



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : SP DIPA- 013.08.2.408877/2024**



DS:4005-9118-1619-4554

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024

Revisi ke 03

Tanggal : 09 Juli 2024

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2. Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
3. Provinsi : (22) BALI
4. Kode>Nama Satker : (408877) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
- Sebesar : Rp. 485.000.000 (EMPAT RATUS DELAPAN PULUH LIMA JUTA RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.03 PEMBINAAN HUKUM

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

013.08.BB Program Pembentukan Regulasi
013.08.BB. Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah

Jumlah Uang

Rp. 485.000.000
Rp. 485.000.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	485.000.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN D E N P A S A R (037) Rp. 485.000.000

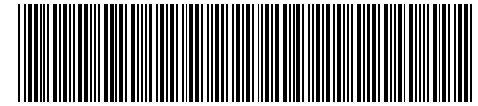
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Jakarta, 24 November 2023
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : I A. 1

Program	:	013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi			485.000.000
Kegiatan	:	5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah			485.000.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan			
		2. 01	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM	34,00	Rekomendasi Kebijakan, Kajian	467.275.000
Rincian Output	:	01 ABD.001	Rekomendasi Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah	34,00	Rekomendasi Kebijakan	467.275.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM	20,00	Orang	17.725.000
Rincian Output	:	01 ADG.001	Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan di daerah	20,00	Orang	17.725.000

Jakarta, 24 November 2023

Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.

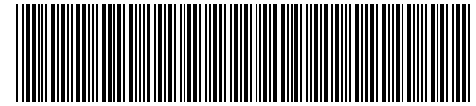
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2024

NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024

I B. SUMBER DANA



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
 Provinsi : (22) BALI
 Kode>Nama Satker : (408877) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

						Pagu	Ekuivalen Rupiah	
1. Anggaran Tahun 2024	Rp.	485.000.000	Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	485.000.000		(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0		b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0		(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0		c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0		d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0		e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :				f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI
Kewenangan : (KD)

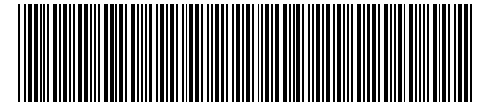
Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
408877	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI	-	485.000	-	-	-	485.000		
013.08.BB	Program Pembentukan Regulasi	-	485.000	-	-	-	485.000		
5250	Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	-	485.000	-	-	-	485.000		
5250.ABD	Kebijakan Bidang Hukum dan HAM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	467.275	-	-	-	467.275	22 . 51	
01	RM	-	467.275	-	-	-	467.275	037	
5250.ADG	Standarisasi Profesi dan SDM (22.51 BALI / KOTA DENPASAR)	-	17.725	-	-	-	17.725	22 . 51	
01	RM	-	17.725	-	-	-	17.725	037	
JUMLAH		-	485.000	-	-	-	485.000		

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : (08) Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : (22) BALI
Kode>Nama Satker : (408877) KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

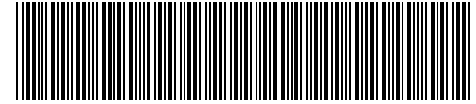
Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	408877	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	54.355	47.300	64.757	51.390	31.780	44.715	39.840	39.840	45.720	54.085	11.219	485.000
		BELANJA BARANG	0	54.355	47.300	64.757	51.390	31.780	44.715	39.840	39.840	45.720	54.085	11.219	485.000
	013.08.BB.5250	Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	0	54.355	47.300	64.757	51.390	31.780	44.715	39.840	39.840	45.720	54.085	11.219	485.000
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	0	54.355	47.300	64.757	51.390	31.780	44.715	39.840	39.840	45.720	54.085	11.219	485.000

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024
IV A. B L O K I R**



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408877] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2024
NOMOR : DIPA- 013.08.2.408877/2024
IV B. C A T A T A N**



DS:4005-9118-1619-4554

Kementerian Negara/Lembaga : [013] KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Organisasi : [08] Ditjen Peraturan Perundang-Undangan
Provinsi : [22] BALI
Kode dan Nama Satker : [408877] KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BALI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 24 November 2023
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

ttd.
Dr. H. Asep N. Mulyana, S.H, M.Hum
NIP. 196908141996031001